

# KONSEP PENATAAN PERKAMPUNGAN NELAYAN DI KENAGARIAN IV KOTO HILIE, KECAMATAN BATANG KAPAS, KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA

Gifa Mislahu Filjannah<sup>1)</sup>, Desy Aryanti<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, Padang.

Email korespondensi : [gifamislahu21@gmail.com](mailto:gifamislahu21@gmail.com), [desyaryanti@bunghatta.ac.id](mailto:desyaryanti@bunghatta.ac.id)

## ABSTRAK

Perkampungan nelayan di Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, merupakan kawasan dengan potensi besar dalam sektor perikanan dan pariwisata. Namun, kondisi eksisting menunjukkan berbagai permasalahan, seperti penataan permukiman yang kurang teratur, rendahnya kualitas infrastruktur dasar, serta kurangnya pengintegrasian konsep keberlanjutan dalam tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep penataan perkampungan nelayan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis literatur. Data yang diperoleh dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat nelayan, potensi kawasan, serta tantangan yang dihadapi. Fokus utama penelitian meliputi tata ruang permukiman, pengelolaan lingkungan, penguatan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi serta sosial masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkampungan nelayan di IV Koto Hilie membutuhkan konsep penataan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan tetap mempertahankan karakter budaya lokal. Konsep yang diusulkan meliputi zonasi ruang yang jelas antara area permukiman, aktivitas ekonomi, dan konservasi lingkungan; peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti sanitasi dan sistem pengelolaan limbah; serta penyediaan ruang terbuka hijau untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat nelayan menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi konsep penataan ini. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan perencanaan kawasan perkampungan nelayan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir Sumatera Barat. Implementasi konsep penataan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat potensi kawasan sebagai destinasi wisata berbasis maritim.

**Kata kunci :** IV Koto Hilie, konsep penataan, kualitas lingkungan, perkampungan nelayan

## ABSTRACT

The fishing village in Kenagarian IV Koto Hilie, Batang Kapas District, South Coast Regency, West Sumatra Province, is an area with enormous potential in the fisheries and tourism sectors. As things stand, though, there are a number of issues, such as the disorganized layout of settlements, the poor quality of basic infrastructure, and the fact that the idea of sustainability is not taken into account when planning spaces. This research aims to formulate the concept of sustainable fishing village planning, taking into account social, cultural, environmental, and economic aspects. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods in the form of field observations, in-depth interviews, documentation studies, and literature analysis. We comprehensively analyze the obtained data to identify the needs of the fishing community, the potential of the area, and the challenges faced. The main focus of the research includes residential spatial planning, environmental management, strengthening infrastructure, and developing facilities to support economic and social activities in the fishing community. The results of the study show that the fishing village in IV Koto Hilie requires a structuring concept that integrates the principles of sustainability while maintaining the local cultural character. The idea being put forward includes making it clear where residential areas, business areas, and environmental protection areas belong; making basic infrastructure like sewers and trash systems better; and giving people green spaces to help the environment last. In addition, the active participation of the fishing community is an important element in the successful implementation of this structuring concept. This research contributes to the development of planning for fishing village areas in Indonesia, especially in the coastal area of West Sumatra. The implementation of this structuring concept is expected to improve the quality of life of the fishing community, support environmental sustainability, and strengthen the potential of the area as a maritime-based tourist destination.

**Keywords:** IV Koto Hilie, concept of structuring, environmental quality, fishing village

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut, memiliki sebagian besar penduduknya yang bergantung pada sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama. Sebagai konsekuensinya, banyak dari mereka bermukim di kawasan pesisir yang terbentuk secara alami mengikuti kondisi geografis dan ekologis daerah tersebut. Pemukiman pesisir seringkali berkembang tanpa perencanaan yang baik, sehingga pola penataannya menjadi tidak terstruktur dan rentan terhadap bencana alam. Dalam jangka panjang, tekanan populasi yang meningkat serta perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi menyebabkan pemukiman ini berubah dari perkampungan kecil menjadi permukiman besar yang lebih kompleks (Wunas, 2007).

Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat adalah salah satu wilayah yang menggambarkan fenomena tersebut. Dengan garis pantai sepanjang 234 kilometer, kabupaten ini memiliki banyak kampung nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Salah satu kampung nelayan yang penting di daerah ini adalah Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas. Di lokasi ini, mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, sementara sisanya menjalankan profesi pendukung seperti berkebun dan berdagang (Dinas Perikanan, 2021). Kendati memiliki potensi ekonomi yang besar, kampung nelayan di Kenagarian IV Koto Hilie menghadapi berbagai tantangan. Pemukiman yang berkembang secara organik seringkali tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai, seperti sanitasi, pengelolaan air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, sebagian besar rumah di kawasan ini berada dalam kondisi yang tidak layak huni. Ketidakteraturan tata ruang dan kurangnya integrasi dengan prinsip keberlanjutan juga menjadi persoalan yang mendesak untuk diatasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan konsep penataan perkampungan nelayan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, peningkatan kualitas hunian, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip perencanaan tata ruang yang inklusif, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pelestarian budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perancangan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini akan mengkaji kondisi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat di Kenagarian IV Koto Hilie. Observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen digunakan untuk menggali informasi yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan rekomendasi praktis bagi penataan kampung nelayan di kawasan ini, tetapi juga menjadi referensi untuk perencanaan serupa di wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

## 2. STUDI LITERATUR

Dalam konteks perkampungan nelayan, literatur telah banyak membahas berbagai aspek mulai dari karakteristik sosial-ekonomi masyarakat, tantangan lingkungan, hingga konsep penataan ruang. Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori yang mendukung pentingnya penataan perkampungan nelayan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan. Menurut Raharjo (2014), kampung nelayan didefinisikan sebagai permukiman yang dihuni oleh masyarakat dengan pola kerja homogen, yaitu berfokus pada sektor perikanan laut. Karakteristik khas kampung nelayan di Indonesia mencakup lokasi yang dekat dengan perairan, akses yang mudah ke tempat pencaharian, serta keberadaan sarana pendukung seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan gudang penyimpanan ikan (Departemen Pekerjaan Umum, 2014). Elemen-elemen ini menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang perkampungan nelayan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat nelayan memiliki hubungan erat dengan sumber daya laut sebagai basis ekonomi utama mereka. Selain itu, mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan pengajian, yang menunjukkan peran penting komunitas dalam kehidupan sehari-hari (BPS Batang Kapas, 2020). Dalam lingkup nasional, sektor perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan protein masyarakat Indonesia, mencapai sekitar 54% dari total konsumsi protein hewani. Selain itu, sektor ini juga menjadi penggerak

ekonomi lokal dan memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara melalui ekspor hasil laut (Kompasiana, 2024).

Penataan ruang dalam konteks perkampungan nelayan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Shirvani (1985) menyebutkan bahwa perencanaan tata guna lahan yang efisien, penataan massa bangunan yang teratur, dan keberadaan ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Di kawasan nelayan, penataan ini juga harus memperhatikan ketahanan terhadap bencana, terutama mengingat risiko erosi pantai dan kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Beberapa studi kasus telah menunjukkan keberhasilan penataan perkampungan nelayan berbasis komunitas. Sebagai contoh, di Cilincing, Jakarta Utara, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan ruang telah meningkatkan kualitas hidup mereka. Di Pulau Seliu, Belitung, konservasi mangrove yang dikombinasikan dengan pengembangan ekowisata telah menjadi model keberlanjutan yang dapat diterapkan di tempat lain (Fachrudin, 2019). Studi-studi ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan ruang.

Dalam kerangka regulasi, kebijakan nasional dan daerah memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan kampung nelayan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi landasan utama untuk penataan kawasan pesisir. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah mengatur penggunaan lahan untuk sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata, yang menjadi arah pengelolaan perkampungan nelayan yang berkelanjutan (Perda Kabupaten Pesisir Selatan, 2015). Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa penataan perkampungan nelayan harus mengintegrasikan pendekatan ekologi, ekonomi, dan sosial. Keberhasilan penataan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang komprehensif, perkampungan nelayan dapat dikembangkan menjadi kawasan yang layak huni, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan tata ruang perkampungan nelayan di Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu menggambarkan secara rinci dan kontekstual fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian deskriptif eksploratif digunakan untuk menganalisis potensi, permasalahan, serta kebutuhan masyarakat nelayan, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi penataan yang relevan dan aplikatif.

Lokasi penelitian difokuskan pada Kenagarian IV Koto Hilie, sebuah kawasan pesisir yang memiliki komunitas nelayan dengan karakteristik geografis dan budaya yang khas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensi ekonominya yang signifikan, tetapi juga pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas nelayan, termasuk kondisi infrastruktur dan tata ruang yang belum optimal. Dalam penelitian ini, subjek yang dilibatkan mencakup masyarakat nelayan, tokoh masyarakat, serta pihak pemerintah setempat. Informan dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial ekonomi komunitas nelayan dan pengetahuan mereka tentang tata ruang perkampungan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam melibatkan informan kunci seperti nelayan, pemimpin komunitas, dan pejabat pemerintah untuk menggali pandangan mereka tentang kondisi perkampungan, permasalahan yang dihadapi, serta harapan mereka terkait penataan kawasan. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati langsung kondisi fisik perkampungan, termasuk tata letak rumah, infrastruktur, fasilitas umum, dan ruang terbuka. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi masalah tata ruang yang ada sekaligus mengeksplorasi peluang perbaikan. Selain itu,

studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi, laporan pemerintah, serta literatur akademik terkait kebijakan penataan ruang di kawasan pesisir. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, di mana informasi yang relevan dipisahkan dari yang tidak relevan. Kemudian, data disajikan dalam format yang lebih terstruktur, seperti tabel, diagram, dan narasi, untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan literatur yang relevan, sehingga dapat dirumuskan konsep penataan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen. Validasi hasil juga dilakukan dengan meminta umpan balik dari informan kunci mengenai interpretasi awal yang dilakukan peneliti. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip-prinsip etika, termasuk meminta persetujuan informan sebelum wawancara, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan memastikan bahwa partisipasi bersifat sukarela.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi dan kebutuhan perkampungan nelayan di Kenagarian IV Koto Hilie. Hasil penelitian tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi praktis bagi penataan kawasan tersebut tetapi juga menjadi referensi bagi perencanaan serupa di wilayah pesisir lainnya.



Gambar 1. Peta Delinasi Kawasan

Sumber : Google Maps, 2022

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Teluk Betung merupakan salah satu kampung yang terletak di Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung Teluk Betung memiliki luas 14,29 Km<sup>2</sup>, dan merupakan perkampungan nelayan, karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.





**Gambar 2.** Tautan Lingkungan

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022

Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, kawasan perkampungan nelayan Teluk Betung memiliki luas 9,1 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 450 jiwa. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Teluk Betung menggantungkan mata pencaharian pada hasil laut, di mana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan. Selain itu, sebagian penduduk juga memiliki profesi lain, seperti berkebun dan berdagang.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan, dijelaskan mengenai tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis, kawasan perkampungan nelayan Teluk Betung termasuk dalam klasifikasi kepadatan rendah, dengan rincian sebagai berikut :

- = Jumlah jiwa/Ha : luas wilayah
- = 450 jiwa : 9 Ha
- = **50 jiwa/Ha**

**Tabel 1.** Klasifikasi kepadatan penduduk

Klasifikasi Kawasan	Kepadatan			
	Rendah	sedang	Tinggi	Sangat Padat
Kepadatan Penduduk	< 150 Jiwa/Ha	151 - 200 Jiwa/Ha	200 – 400 Jiwa/Ha	>400 Jiwa/Ha

Sumber : Hasil analisa, 2020

Pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan teori Hamid Shirvani, yang meliputi aspek-aspek seperti tata guna lahan, bentuk dan tatanan massa bangunan, sirkulasi, aktivitas pendukung, dan ruang terbuka. Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Batang Kapas 2020, lokasi yang dianalisis merupakan kawasan perkampungan nelayan. Status kepemilikan tanah di kawasan ini bervariasi, di mana rumah dengan bangunan permanen dan semi permanen dimiliki secara pribadi atau perseorangan,

sedangkan untuk bangunan rumah yang bersifat temporer, status kepemilikan tanahnya tidak jelas atau ilegal.

Bentuk hunian di kawasan perkampungan nelayan ini terbagi menjadi tiga kategori:

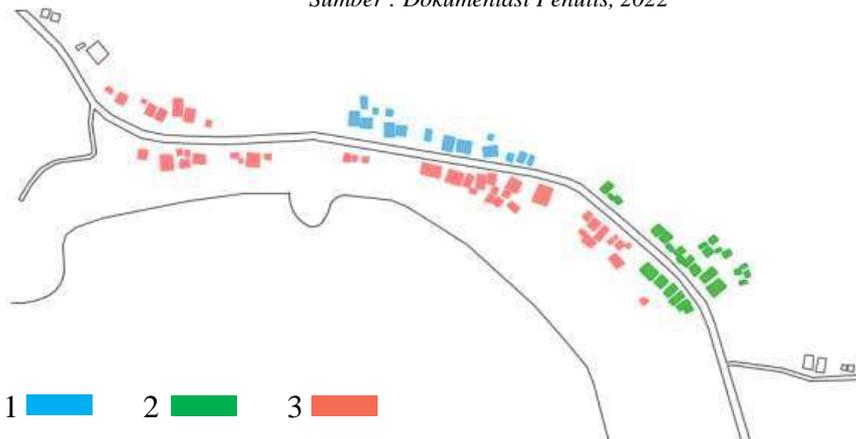
1. Rumah permanen: 26 unit (30%)
2. Rumah semi permanen: 26 unit (30%)
3. Rumah temporer: 34 unit (40%)

Dalam konsep penataan kawasan ini, rumah dengan bangunan semi permanen dan temporer akan direlokasi untuk meningkatkan kualitas perumahan dan mendukung pengembangan lingkungan yang lebih teratur dan layak huni.



**Gambar 3.** Tautan Lingkungan

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022



**Gambar 4.** Peta Tapak

Sumber : Analisa Penulis, 2022

Keterangan :

1. Rumah permanen, 26 unit (30%)
2. Rumah semi permanen, 26 unit (30%)
3. Rumah temporer, 34 unit (40%)

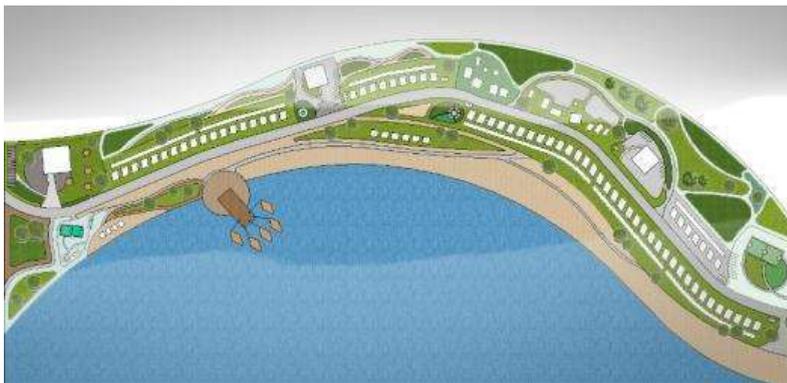
Jalur sirkulasi dalam kawasan terbagi menjadi tiga yaitu jalan primer (jalan raya), jalan skunder (jalan menuju pemukiman warga), dan jalan menuju perkebunan warga, seperti terlihat dibawah ini :



**Gambar 5.** Jalur Sirkulasi di Kawasan

*Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022*

Konsep penataan jalur sirkulasi di kawasan ini bertujuan untuk memaksimalkan jalur pedestrian serta menambah taman di sepanjang pantai dan pemukiman. Selain jalur pedestrian, akan dibangun juga jalur sepeda untuk meningkatkan mobilitas yang ramah lingkungan. Selain itu, ruang terbuka yang ada akan dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan masyarakat, dengan menyediakan taman bermain bagi anak-anak dan sarana olahraga. Untuk fasilitas parkir, akan ditempatkan di area sekitar fasilitas olahraga dan mushollah, sehingga memudahkan akses bagi pengunjung tanpa mengganggu sirkulasi utama dan area pemukiman.



No	Keterangan
1	Caft
2	Tepian Pantai
3	Lapangan Voli
4	Mushollah
5	Lapangan Bola
6	Taman
7	Araa Sutra
8	Rumah Nelayan
9	Sekolah
10	Pedestrian
11	Rumah Perumahan
12	Parkir

**Gambar 6.** Siteplan Penataan

*Sumber : Analisa Penulis, 2022*

## 5. KESIMPULAN

Kampung Teluk Betung adalah kawasan perkampungan nelayan yang berkembang secara organik sepanjang pantai, dengan kondisi hunian yang sebagian besar tidak layak huni. Oleh karena itu, kawasan ini memerlukan penataan yang terencana untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan hunian. Konsep penataan yang diusulkan diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan pemukiman yang ada di kawasan ini. Berdasarkan hasil analisis, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Urban Design oleh Hamid Shirvani, yang mencakup beberapa aspek penting dalam perencanaan dan penataan ruang, yaitu penataan/perencanaan tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi, aktivitas pendukung, ruang terbuka hijau. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan kawasan perkampungan nelayan Teluk Betung dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih teratur, nyaman, dan layak huni, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

**REFERENSI**

- Badan Pusat Statistika Kecamatan Batang Kapas. (2020). Statistik Kenagarian IV Koto Hilie 2020. *Batang Kapas. Badan Pusat Statistik*.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2022). Petunjuk Teknis Bantuan Penataan Kampung Nelayan 2022. *Kementrian Kelautan dan Perikanan*.
- Fachrudin, Hilma T. (2019). Konsep Penataan Kampung Nelayan. Medan: Jurnal Arsitektur ARCADE.
- Firdaus, Miftah F, Nurini. (2015). Arahan Penataan Kampung Nelayan Volume 1. Surabaya: Media Plano.  
<http://e-journal.uajy.ac.id/10815/3/2TA14263.pdf>
- Ivkotohilie.pesisirselatankab.go.id. (2022). Profil Nagari IV Koto Hilie. Diakses pada 28 Desember 2022, dari <https://ivkotohilie.pesisirselatankab.go.id/>
- John W. Creswell, *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, (New Jersey USA: Pearson Education Inc., 2008)
- Kompasiana.com. (2024). Peran Sektor Perikanan dalam Perekonomian Nasional. Diakses pada 27 Oktober 2024, dari <https://www.kompasiana.com>.
- Maryono, Ady, Eka Priadi, Uray Ferry Andi. (2020). Penataan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan di Kelurahan Kuala, Kota Singkawang Volume 20
- Roma, Romana. (2021). Penataan Kampung Nelayan Sebagai Desa Wisata. Kupang : UPT Perpustakaan Undana.
- Risdian, Happy, Suzana Ratih Sari, Raden Siti Rukayah. (2020). Elemen Perancangan Kota Volume 20. Semarang: MODUL
- Samsu. (2015). Dampak Pembangunan Pesisir Pantai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Abeli Kota Kendari Volume 10. AL-IZZAH
- Sarimay, Arsyad, Purnawan Junaidi. (2004). Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penataan Permukiman Kumuh di Kampung Buaran Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang.
- Surakusumah, Wahyu. (2022). Sistem Penataan Ruang dan Lingkungan. Diakses pada 27 Oktober 2024, dari <http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA>
- Thaher, Maas Syabirin. (2010). Pengembangan Infrastruktur Kampung Nelayan Malabero di Kawasan Wisata Pantai Tapak Paderi Kota Bengkulu: UNDIP-IR
- Tohar, Ibrahim, Suko Istijanto, Rachmawati Novaria, dkk. (2020). Penataan Ruang Integratif Pada Permukiman Nelayan Kejawan Lor Kenjeran Surabaya: Seminar Nasional Konsorium UNTAG.
- Wasak, Martha P. (2010) Keadaan Sosial - Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabutuhan Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara: Pasific Journal, 3 (5). pp. 958-962. ISSN 1907-9672